

Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk di Kabupaten Jember

Diah Kartika Sari¹, Hary Yuswadi², Anastasia Murdyastuti³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Jember, Indonesia

Email: kartikadah1983@gmail.com

Abstrak

Hasil pertanian yang melimpah membuat Pemerintah Indonesia memanfaatkannya untuk membangun ketahanan pangan Nasional. Pemerintah meluncurkan program Ketahanan Pangan Nasional dengan memberi dukungan terhadap pasokan rantai makanan melalui penyediaan peralatan mesin pertanian dan peningkatan produktivitas lahan. Pada tahun 2021 kebijakan program Ketahanan Pangan Nasional berfokus pada mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi. Salah satu factor yang sangat penting dalam mendukung peningkatan hasil produksi pertanian adalah proses pemupukan. Namun sangat disayangkan permasalahan pupuk seakan tak pernah berhenti terus menghantui kehidupan para petani. Berdasarkan data Ditjen PSP Kementan RI, kebutuhan pupuk untuk petani mencapai 22,57 sampai 26,18 juta ton atau senilai Rp 63-65 triliun dalam lima tahun terakhir. Tetapi, keterbatasan anggaran pemerintah hanya dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 8,87 juta- 9,55 juta ton dengan nilai anggaran Rp 25-32 triliun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2016:5) menyatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Hasil observasi yang dilakukan peneliti didesa Karang kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten jember peneliti pada tanggal 14 maret 2022, ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses distribusi pupuk didesa Karang kedawung kecamatan mumbulsari kabupaten jember ini yaitu: pertama, alokasi pupuk bersubsidi dibidang semakin sedikit dan mengakibatkan banyak petani yang tidak mendapatkan jatahnya. Kedua, banyak pihak yang memanfaatkan keadaan dengan memborong pupuk kemudian menjual kedaerah lain diluar daerah penerima kuota pupuk tersebut. Ketiga, adanya oknum yang memalsukan pupuk serta menjual pupuk tanpa izin. Keempat, ketersediaan pupuk-pupuk diagen dan kios pertanian tidak lengkap serta yang kelima, banyaknya petani yang masih gagap teknologi sehingga akses pupuk dengan system yang baru melalui HP/media internet kurang berjalan mulus.

Kata Kunci: *Kebijakan, Distribusi, Pupuk.*

Abstract

Abundant agricultural products make the Indonesian government use it to build national food security. The government launched the National Food Security program by providing support to the food chain supply through the provision of agricultural machinery and increasing land productivity. In 2021 the National Food Security program policy will focus on encouraging the production of food commodities by building infrastructure and using technology. One of the most important factors in supporting the increase in agricultural production is the fertilization process. However, it is very unfortunate that the problem of fertilizers seems to never stop haunting the lives of farmers. Based on data from the Directorate General of PSP of the Ministry of Agriculture, the need for fertilizer for farmers has reached 22.57 to 26.18 million tons or Rp. 63-65 trillion in the last five years. However, the government's limited budget can only allocate subsidized fertilizers of 8.87 million-9.55 million tons with a budget value of Rp 25-32 trillion. This study uses a qualitative approach. Denzin and Lincoln (in Moleong, 2016: 5)

stated that qualitative research is research that uses a natural setting that intends to interpret phenomena that occur and is carried out by involving various existing methods. The results of observations made by researchers in Karang Kedawung Village, Mumbulsari District, Jember Regency, researchers in On March 14, 2022, there were several problems that occurred in the fertilizer distribution process in Karang Kedawung Village, Mumbulsari District, Jember Regency, namely: first, the allocation of subsidized fertilizers was said to be getting smaller and resulted in many farmers not getting their share. Second, many parties take advantage of the situation by buying up fertilizer and then selling it to other areas outside the area receiving the fertilizer quota. Third, there are people who fake fertilizers and sell fertilizers without a permit. Fourth, the availability of fertilizer agents and agricultural kiosks is not complete and fifth, many farmers are still technologically stuttering so that access to fertilizers with the new system via cellphones/internet media does not run smoothly.

Keywords: *Policy, Distribution, Fertilizer.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sekitar 1.904.569 kilometer persegi dengan jumlah pulau 17.000 pulau, dimana hanya sekitar 7000 pulau saja yang berpenghuni. Selain pulau-pulau yang indah, iklim tropis yang dimiliki Indonesia juga menjadikan Indonesia berpotensi menjadi negara agraris. Negara agraris adalah negara yang mana mayoritas penduduknya bekerja disektor pertanian. Dengan dua musim yang ada di Indonesia secara otomatis sangat membantu proses bercocok tanam dengan berbagai macam jenis tanaman.

Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia memiliki tanah yang subur karena mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujannya cukup tinggi. Hal ini juga sangat berpengaruh pada hasil pertanian sebagai sector komoditi pangan nasional. Hasil pertanian di Indonesia bermacam-macam dari sayur-sayuran hingga buah-buahan. Ada beberapa wilayah di negara ini yang kaya akan hasil pertaniannya diantaranya adalah Karawang dan Cianjur (Jawa Barat), Madura, Jombang (Jawa Timur), Banjarnegara dan Kebumen (Jawa Tengah), Provinsi Bali, dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. Beberapa hasil sektor pertanian adalah padi, ketela, ubi, kentang, sayuran, kacang-kacangan, dan sebagainya. Selain menghasilkan sayuran dan buah-buahan Indonesia juga berpotensi menghasilkan rempah-rempah, seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili yang merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang juga menjadi komoditi ekspor.

Dengan hasil pertanian yang melimpah, Pemerintah Indonesia memanfaatkannya untuk membangun ketahanan pangan Nasional. Pemerintah meluncurkan program Ketahanan Pangan Nasional dengan memberi dukungan terhadap pasokan rantai makanan melalui penyediaan peralatan mesin pertanian dan peningkatan produktivitas lahan. Pada tahun 2021 kebijakan program Ketahanan Pangan Nasional berfokus pada mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi.

Salah satu factor yang sangat penting dalam mendukung peningkatan hasil produksi pertanian adalah proses pemupukan. Namun sangat disayangkan permasalahan pupuk seakan tak pernah berhenti terus menghantui kehidupan para petani. Berdasarkan data Ditjen PSP Kementan RI, kebutuhan pupuk untuk petani mencapai 22,57 sampai 26,18 juta ton atau senilai Rp 63-65 triliun dalam lima tahun terakhir. Tetapi, keterbatasan anggaran pemerintah hanya dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 8,87 juta- 9,55 juta ton dengan nilai anggaran Rp 25-32 triliun.

Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta mengatakan, ada lima potensi masalah terkait penyaluran pupuk subsidi ke daerah. Yaitu perembesan antarwilayah, kelangkaan, mark up harga eceran tertinggi (HET) di tingkat petani, alokasi menjadi tidak tepat sasaran hingga produktivitas tanaman menurun. Sejumlah petani mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi yang disampaikan oleh beberapa kepala desa kepada Bupati Hendy Siswanto dalam kegiatan Jember Hadir Untuk Rakyat (J-HUR) yang digelar

di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Soal kelangkaan pupuk, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Jember sudah melakukan rapat koordinasi pembahasan di Kantor Pemkab Jember dan menjamin bahwa stok pupuk bersubsidi masih aman. Hingga 15 Februari 2022 tercatat total realisasi pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 12.879 ton, sedangkan stok di gudang penyangga sebesar 2.072 ton, kemudian pupuk ZA sebesar 1.068 ton dengan stok di gudang sebesar 3.384 ton, kemudian pupuk SP 36 sebanyak 80 ton dengan stok di gudang sebesar 736 ton. Kemudian pupuk Phonska sebesar 5.734 ton dengan stok di gudang 1.583 ton, pupuk Petroganik sebesar 1.893 ton dengan stok di gudang 63 ton, dan Phonsca OCA sebanyak 1.620 liter dengan stok di gudang 2.592 liter. (AntaraJatim.2022).

Hasil observasi yang dilakukan peneliti didesa Karang kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten jember peneliti pada tanggal 14 maret 2022, ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses distribusi pupuk didesa Karang kedawung kecamatan mumbulsari kabupaten jember ini yaitu: pertama, alokasi pupuk bersubsidi dibidang semakin sedikit dan mengakibatkan banyak petani yang tidak mendapatkan jatahnya. Kedua, banyak pihak yang memanfaatkan keadaan dengan memborong pupuk kemudian menjual kedaerah lain diluar daerah penerima kuota pupuk tersebut. Ketiga, adanya oknum yang memalsukan pupuk serta menjual pupuk tanpa izin. Keempat, ketersediaan pupuk-pupuk diagen dan kios pertanian tidak lengkap serta yang kelima, banyaknya petani yang masih gagap teknologi sehingga akses pupuk dengan system yang baru melalui HP/media internet kurang berjalan mulus.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) dalam buku Ristanto (2015) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Lingkup kebijakan publik sangat luas seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh Dunn (2011:132) bahwa dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait.

Implementasi kebijakan melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "street level bureaucrats" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang fungsinya sebagai implementor. Sebaliknya untuk masalah makro maka kebijakan harus melibatkan berbagai institusi pemerintah seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa. Distribusi pupuk adalah permasalahan klasik dan merupakan masalah makro sehingga memerlukan berbagai institusi dari pusat sampai tingkat bawah dalam penyelesaian dan solusi pemecahann permasalahannya.

Distribusi

Yang dimaksud Distribusi disini adalah kaitannya dengan pelaksanaan dalam penyaluran pupuk oleh pemerintah kepada petani. Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat dalam jurnal (Saputra, 2013). Selain itu imuwon ekonomi konvensional Philip Kotler pada (Saputra, 2013) menyatakan bahwa distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Distribusi adalah pembagian barang keperluan sehari-hari terutama dalam masa darurat oleh pemerintah kepada pegawai negeri dan penduduk.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2016:5) menyatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif menurut Moloeng (2016:11) adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan demikian data dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk di Desa Karang kedawung Kecamatan mumbulsari Kabupaten Jember.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer sebagai data utama penunjang penelitian dan diperkuat dengan data sekunder sebagai pendukung kebenaran pada data primer. Data sekunder diambil dari tinjauan data-data faktual yang terdapat pada satuan kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jember. Data ini berupa dokumentasi terkait distribusi pupuk, RDKK dari kelompok Tani, rekapitulasi penerima pupuk serta mekanisme sistem distribusi pupuk. Terdapat beragam model dalam tehnik analisis data, sehingga metode yang ditentukan oleh peneliti adalah tehnik analisis data interaktif. Perlu pengolahan data terlebih dahulu agar dapat menghasilkan data relevan dan sesuai dengan harapan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *grand theory* implementasi kebijakan dari George C. Edward III sebagai dasar untuk melakukan observasi, wawancara kepada informan dan mengambil dokumentasi pendukung pada proses implementasi kebijakan distribusi pupuk didesa karang kedawung kecamatan mumbulsai kabupaten jember meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Peneliti mengambil *sample* perbandingan empat kios resmi pengecer pupuk yang tersebar diwilayah desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Tehnik wawancara dilakukan menggunakan materi wawancara terlampir kepada sekitar 10 informan utama dan tambahan yang berkaitan langsung dengan proses distribusi pupuk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/ 101/ 1.12/2021 tentang komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, juknis sosialisasi system E-Alokasi Puuk Bersubsidi Kementerian Pertanian Republik Indonesia E-Alokasi Tahun 2023. Dalam Permentan No. 10 Tahun 2022 Bab III Pasal 3 menjelaskan:

1. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 Ha setiap musim tanam
2. Usaha sub sector tanamanpangan sebagaimana ayat satu adalah padi, jagung dan kedelai
3. Usaha tani subsector holtikultura sebagaimana ayat satu adalah cabai, bawang merah, bawang putih
4. Usaha tani subsector perkebunan sebagaimana ayat satu adalahtebu rakyatm kopi dan kakao
5. Petani sebagaimana dimaksud tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN

Fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah Pelaksanaan Poses Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka permasalahan pelaksanaan proses distribusi pupuk bersubsidi antara lain sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana prasarana pertanian di desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember,
2. Disparitas harga yang sangat mencolok antara pupuk bersubsidi dan non subsidi,
3. Kenaikan harga pangan dan energi membuat daya beli petani terhadap pupuk menurun,
4. Kenaikan harga pupuk dan bahan baku pupuk pasca konflik global perang rusia-Ukraina sebagai produsen bahan baku P dan K membuat pemerintah menekan produksi untuk melimit anggaran
5. Pembatasan Impor P dan K dari Cina
6. Kurangnya dukungan pendanaan dari APBN dan APBD bagi penyelenggaraan pertanian,
7. Terbatasnya SDM beberapa implementor dan petani terhadap tekhnologi dan system pertanian terbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Dinas Pertanian, Kios Pengecer Resmi, Pengurus Kelompok Tani dan Petani di desa karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Distribusi Pupuk pada Dimensi komunikasi yang terjalin kurang berjalan maksimal dikarenakan beberapa hal, seperti jadwal pertemuan yang tidak maksimal, sikap individualis petani, kurang tertarik kepada lahannya yang dirasa kurang menghasilkan sehingga petani lebih memilih mendahulukan pekerjaan lainnya. Dimana seharusnya Komunikasi adalah hal yang sangat penting terkait kelancaran proses pendistribusian pupuk agar tidak terjadi banyak kerancuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Dinas Pertanian, Kios Pengecer Resmi, Pengurus Kelompok Tani dan Petani di desa karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Distribusi Pupuk pada Dimensi ketersediaan sumber daya manusia belum maksimal, dimana ditemukan masih banyak petani yang belum mampu mengoperasikan gawai untuk mengakses data dan informasi serta sosialisai yang mana sekarang telah bisa diakses menggunakan system online.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Dinas Pertanian, Kios Pengecer Resmi, Pengurus Kelompok Tani dan Petani di desa karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Distribusi Pupuk pada Dimensi disposisi telah terpenuhi dan berjalan dengan baik. Disposisi atau sikap dan perilaku para aktor pelaksana sangat menentukan sebuah program pemerintah berjalan dengan baik atau gagal diimplementasikan. Proses distribusi pupuk yang dilakukan oleh pemerintah melau distributor dan agen pengecer resmi hingga sampai kepetani tidak mengalami maslah yang berarti, dan berjalan sesuai dengan juknis pelaksanaan. Para implementor seperti dinas petanian, agen, kios kelompok petani sama-sama memiliki perilaku yang kooperatif sehingga pelaksanaan program berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Dinas Pertanian, Kios Pengecer Resmi, Pengurus Kelompok Tani dan Petani di desa karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Distribusi Pupuk pada Dimensi struktur birokrasi terpenuhi dan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat hingga dapat dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Kebijakan implementasi Distribusi pupuk berasal dari keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian yang diteruskan ke seluruh wilayah di Indonesia. Kebijakan juga menuntut pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaan distribusin pupuk. Tugas ketua kelompok tani adalah mendafta kebutuhan petani kemudian mengkomunikasikannya kepada PPL atau Petugas Penyuluh lapang melalui RDKK atau Rencana Definitif kebutuhan Kelompok yang akan diteruskan kepada kios pengece sesuai dengan kelompok tani yang dinanunginta.. Kemudian PPL melakukan monitoring dan Evaluasi langsung kepada kios pupuk pengecer resmi terhadap pelaksanaan distribusi pupuk.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut: **Pertama**, Implementasi kebijakan distribusi pupuk didesa karang kedawung Kecamatan Mumbulsari kabupaten jember dalam dimensi komunikasi kurang berjalan dengan baik. Masih banyak petani yang tidak bisa hadir dalam pertemuan kelompok karena satu dan lain hal, komunikasi yang terjalin antara ketua kelompok tani, petani dan kios juga kurang intens yang berakibat pada tidak pastinya data penerima pupuk. Jika pupuk melebihi kuota karena tidak diambil membuat kios pengecer berinisiatif mengecer pupuk kepada petani lain yang lebih membutuhkan guna mempecepat peredaran uang. Proses tanam petani yang melebihi waktu atau lebih cepat membuat kebutuhan pupuk semakin meningkat sehingga berakibat pada tingginya pemenuhan kebutuhan yang memberi celah pada mafia pupuk untuk memainkan harga. **Kedua**, Implementasi kebijakan distribusi pupuk didesa karang Kedawung pada dimensi Sumber Daya khususnya ketersediaan sumber daya manusia kurang terpenuhi sesuai dengan standar kualitas terutama pada kalangan kelompok tani dan petani sendiri. Sikap etnosentris dari kalangan petani senior selalu menganggap jika petani tidak perlu bersekolah tinggi dan melek teknologi, hal ini berakibat pada rendahnya kualitas serapan informasi karena lemahnya literasi digital yang dimiliki. Sehingga program pertanian yang disediakan pemerintah melalui media online tidak dapat diakses dengan maksimal. **Ketiga**, Implementasi kebijakan distribusi pupuk didesa karang kedawung pada dimensi disposisi telah terpenuhi dan berjalan dengan baik. Disposisi atau sikap dan perilaku para aktor pelaksana sangat menentukan sebuah program pemerintah berjalan dengan baik atau gagal diimplementasikan. Proses distribusi pupuk yang dilakukan oleh pemerintah melalui distributor dan agen pengecer resmi hingga sampai ke petani tidak mengalami masalah yang berarti, dan berjalan sesuai dengan juknis pelaksanaan. Para implementor seperti dinas pertanian, agen, kios kelompok petani sama-sama memiliki perilaku yang kooperatif sehingga pelaksanaan program berjalan dengan baik. **Terakhir**, Implementasi kebijakan distribusi pupuk pada dimensi struktur birokrasi terpenuhi dan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat hingga dapat dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Kebijakan implementasi Distribusi pupuk berasal dari keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian yang diteruskan ke seluruh wilayah di Indonesia. Kebijakan juga menuntut pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaan distribusi pupuk. Tugas ketua kelompok tani adalah mendata kebutuhan petani kemudian mengkomunikasikannya kepada PPL atau Petugas Penyuluh lapangan melalui RDKK atau Rencana Definitif kebutuhan Kelompok yang akan diteruskan kepada kios pengecer sesuai dengan kelompok tani yang dinandung. Kemudian PPL melakukan monitoring dan Evaluasi langsung kepada kios pupuk pengecer resmi terhadap pelaksanaan distribusi pupuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ragimun dkk. 2020. Jurnal Ilmiah M-Progress. *Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indonesia*. Vol. 10, No. 12. Manajemen FE Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Cholidin Nasir. 2017. Jurnal Konstitusi. *Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit*. Vol. 14, No. 4. Program Doktorat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang
- Lena Sari Dalimunthe dkk. 2021. *Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan*. Program studi Magister pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. Medan. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>. DOI: 10.31289/perspektif.v10i2.5059
- Virginia Patrisia Saluman dkk. 2017. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. *Implementasi Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan*

- Talau* (Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talau). Vol. 2 No. 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
- Sugihartini Utami. 2012. Vol. 1, No. 1. Jurnal mahasiswa Fisip Untan. *Faktor- Faktor Penyebab Kurang Efektifnya Implementasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>.
- Nur Mufida dkk. *Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*. Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
- Sularno dkk. *Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Achmad Suryana. 2014. *Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan Tantangan dan Penanganannya*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Agus Dwi Nugroho dkk. 2018. *AGRISOCIONOMICS Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Program Studi Ekonomi Pertanian/Agrobisnis, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/agrisociconomics>.
- Fajar Mulia. 2016. *Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jember.
- Sularno dkk. 2016. *Jurnal Agrosains dan Teknologi*. Vol. 1 No. 2. *Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dun, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Ginanjar, Nugraha Jiwapraja. 1980. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Acro.
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Jann, Werner dan Kai Wegrich. 2015. *Teori Siklus Kebijakan dalam Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik, dan Metode*, editor Frank Fischer, Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney. Terj. Imam Baihaqie (hlm 61-89). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Moleong. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Rustanto, Bambang Dr. 2015. *Menangani Kemiskinan*. Bandung: Rosda Karya.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zauhar, Soesilo. 1996. *Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Mengapa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/viewFile/289/6>
- Hendrayady, Agus. 2011. *Reformasi Administrasi Publik*. Jurnal Fisip UMRAH Vo.I, No.1.
- Sedarmayanti. 2019. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- The National Team For The Acceleration of Poverty Reduction. 2019. *TNP2K | Welcome*. Retrieved from <http://www.tnp2k.go.id>